

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Upaya Pengembangan Mutu Pendidikan

Pengertian mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran (Abin Syamsudin Makmun, 2006).

Dalam konteks hasil pendidikan, yang dimaksud mutu adalah mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN atau UAS). Dapat pula

prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya : komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.(Umaedi, 1999).

Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolut dan relative (Edward & Sallis, 2004). Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Bila diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanyasedikit siswa yang akan mampu membayarnya. Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berartimemenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*).

Edward & Sallis (2004) dalam Nurkolis, mengemukakan kualitas dalam konsep relatif berhubungan denganprodusen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan.

Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif,terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitupelanggan internal dan eksternal (Kamisa, 1997, dalam Nurkholis). Pendidikan berkualitas apabila :

- a) Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang baik fisik maupunpsikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan

finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.

b) Pelanggan eksternal :

1. Eksternal primer (para siswa): menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, integritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Phillip Hallinger, 1998, dalam Nurkholis). Para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab akan hidupnya.
2. Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahaan); para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahaan dalam menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan.
3. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Upaya pengembangan mutu pendidikan, Sutikno (2006) menjelaskan, untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah, khususnya di kabupaten/kota, seyogyanya dikaji lebih dulu kondisi obyektif dari unsur-unsur yang terkait pada mutu pendidikan, yaitu: (1) kondisi gurunya (persebaran, kualifikasi, kompetensi penguasaan materi, kompetensi pembelajaran, kompetensi sosial-personal,

kesejahteraan), (2) kurikulum disikapi dan diperlakukan oleh guru dan pejabat pendidikan daerah, (3) bahan belajar yang dipakai oleh siswa dan guru (proporsi buku dengan siswa, kualitas buku pelajaran), (4) rujukan sumber belajar oleh guru dan siswa, (5) kondisi prasarana belajar yang ada (jaringan sekolah dan masyarakat, jaringan antarsekolah, jaringan sekolah dengan pusat-pusat informasi), (6) kondisi iklim belajar yang ada saat ini.

2.2. Ujian Nasional (UN) Sebagai Evaluasi Mutu Pendidikan Secara Nasional

Awal dilaksanakannya ujian akhir nasional (UAN) untuk tingkat SMA/MA Tahun 2003 dengan persyaratan minimal nilai kelulusan 3,01, yang artinya nilai di bawah 3,01 dinyatakan tidak lulus. Kemudian untuk meningkatkan 2005 UAN diganti dengan ujian nasional (UN) dan menaikkan standar kelulusan menjadi 4,25, untuk tahun 2006 standar kelulusan dinaikkan lagi menjadi 4,50, begitu pula untuk tahun 2007-2011, standarisasi ujian nasional dan aturan kelulusan terjadi perubahan, untuk tahun 2011 standarisasi ujian nasional terjadi perubahan yang sangat signifikan yakni peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua nilai akhir (NA) sebagaimana diperoleh dari gabungan Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari 6 (enam) mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai UN mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol), Nilai S/M diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 untuk SMA/MA

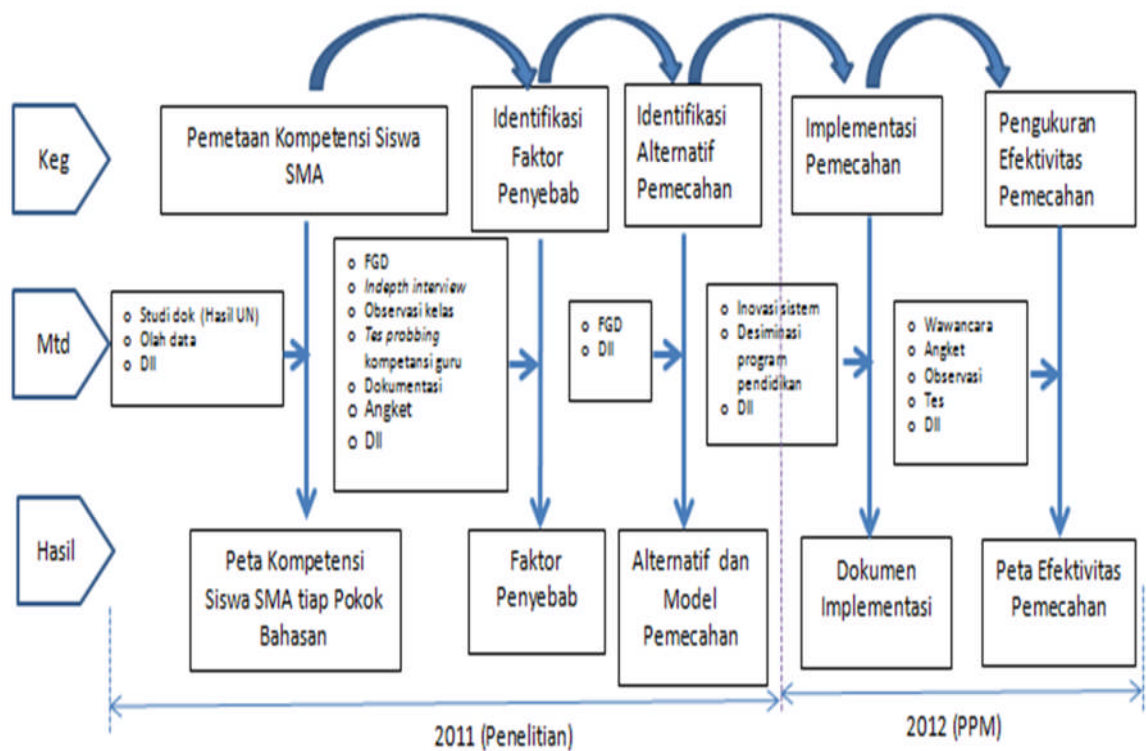
Penentuan Ujian Nasional (UN) sebagai bentuk dari penilaian hasil belajar, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi (PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 63 ayat (1)). Selanjutnya pada Pasal 68, lebih jauh lagi dinyatakan bahwa hasil UN dapat digunakan diantaranya untuk: a). pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dan b). pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk mencapai hal-hal tersebut diatas, maka langkah yang sangat penting untuk dilakukan adalah melakukan analisa atas hasil UN. Melalui analisa UN maka akan dapat diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh peserta didik dan sekolah. Pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa digali adalah: seberapa besar daya serap peserta ujian, pada sub pokok bahasan apa saja terdapat kelemahan daya serap, bagaimanakah keberhasilan guru dalam memberikan pengajaran, satuan pendidikan mana sajakah yang sudah tuntas dalam memberikan pengajaran, bagaimanakah keefektifan kurikulum, dan daerah mana sajakah yang sudah berhasil atau belum menerapkan sistem pendidikan? Selanjutnya, hasil analisis terhadap Ujian Nasional perlu untuk disosialisasikan, sehingga pihak-pihak yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

2.3. Kerangka Dasar Penelitian Pengembangan Mutu Pendidikan

Penelitian ini akan mengacu pada kerangka dasar upaya peningkatan mutu pendidikan seperti tertera pada Gambar 2.1.

Diharapkan hasil penelitian dapat memotret berbagai faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan di Provinsi Riau sebagai wilayah yang diteliti terutama sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan model pemecahan masalah pendidikan di Provinsi Riau yang siap diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan benar-benar fungsional, komprehensif, dan aplikatif yang relevan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau.



Gambar 2.1
Kerangka Dasar Penelitian PPM di Provinsi Riau

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh tim peneliti FKIP Universitas Riau dan merupakan penelitian kebijakan. Desain penelitian mengacu pada kerangka dasar penelitian yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jangkauan penelitian mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Penelitian yang berkaitan dengan masalah mutu pendidikan di Provinsi Riau telah dilakukan, di antaranya adalah:

Tim peneliti pernah menjadi tim penyusun master plan pendidikan di kota Dumai Provinsi Riau. Tujuan akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan master plan pendidikan Kota Dumai adalah: 1) Memberikan acuan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan di Di Kota Dumai; 2) Menyediakan dokumen kajian, pemetaan potensi dan peluang, yang dapat dijadikan dokumen acuan perencanaan terpadu dalam perencanaan pembangunan bidang Pendidikan; 3) Mengembangkan potensi bidang pendidikan Kota Dumai sesuai dengan paradigma baru bidang pendidikan sehingga kualitas pendidikan dapat tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional; dan 4) Merumuskan arah kebijakan, strategi pembangunan, dan rencana tindak (*action plan*) pembangunan bidang pendidikan dalam lima tahun ke depan.

Kesimpulan dari penyusunan master plan pendidikan di Kota Dumai yaitu:

1) Master Plan ini hanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-cita dan harapan yang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang. Master Plan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi para pengelola pendidikan dalam

melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Dumai, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Dumai. Namun sebaliknya, Master Plan Pendidikan ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akan memberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya; 2) Kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di muka, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Dumai. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah Kota Dumai. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kota Dumai. Namun demikian, bagi masyarakat Kota Dumai, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Di samping itu, Tim peneliti pernah juga melakukan kajian dengan judul ''Perencanaan Penyusunan Analisis Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis''. Kajian ini dimaksudkan agar tercapainya target standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kaini bupaten Bengkalis sesegera mungkin.

Sedangkan tujuan pelaksanaan ''Perencanaan Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis'' adalah: 1) Untuk mengetahui dan

mengevaluasi kondisi standar pelayanan pendidikan yang sudah diterapkan di Kabupaten Bengkalis; 2) Untuk mengidentifikasi lebih awal permasalahan pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Bengkalis; 3) Untuk mengetahui dan mengevaluasi program pendidikan penunjang dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bengkalis; 4) Untuk membuat suatu perencanaan dan pengembangan standar pelayanan minimum pendidikan di Kabupaten Bengkalis.

Kesimpulan dari kajian ini adalah: 1) Perencanaan Analisis SPM Bidang Pendidikan ini hanyalah gambaran dari suatu evaluasi program pembangunan pendidikan khususnya pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan menggunakan indikator standar pelayanan minimum menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004. Perencanaan Analisis SPM Bidang Pendidikan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi para pengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Namun sebaliknya, Perencanaan Analisis SPM Bidang Pendidikan ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akan memberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya; 2) Agenda, Kebijakan, dan program pencapaian standar pelayanan minimum Bidang Pendidikan khususnya pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK sebagaimana diuraikan di muka,

merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Berkaitan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, dalam pengembangan mutu pendidikan di Provinsi Riau maka penelitian pemetaan dan pengembangan Mutu Pendidikan di Provinsi Riau merupakan peta jalan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rencananya akan diarahkan untuk memotret berbagai faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan di Provinsi Riau sebagai wilayah yang diteliti terutama sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan model pemecahan masalah pendidikan di Provinsi Riau yang siap diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan benar-benar fungsional, komprehensif, dan aplikatif yang relevan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau.

